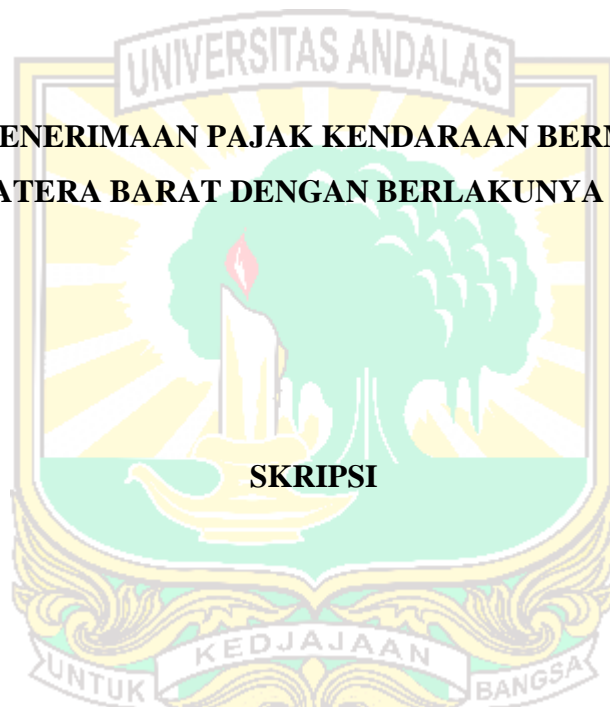




UNIVERSITAS ANDALAS

**PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
DI SUMATERA BARAT DENGAN BERLAKUNYA UU HKPD**



SKRIPSI

AMANDA FITRI

2010513003

**DEPARTEMEN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PADANG
2024**

PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI SUMATERA BARAT DENGAN BERLAKUNYA UU HKPD

Oleh
Amanda Fitri
2010513003

Diajukan ke Departemen Ekonomi,
Pada tanggal 12 Agustus 2024, untuk memenuhi sebahagian
Syarat dalam mencapai derajat
Sarjana Ekonomi

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) menyebabkan adanya perubahan dan penyesuaian ketentuan terkait pajak daerah Di Provinsi Sumatera Barat, PKB adalah pajak yang potensial dan berkontribusi besar dalam penerimaan pajak provinsi. Adanya perubahan ketentuan PKB melalui UU HKPD, diproyeksikan penerimaan PKB di wilayah Sumatera Barat pada tahun 2025 akan mengalami perubahan baik di level provinsi maupun di level kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proyeksi penerimaan PKB di wilayah Sumatera Barat dengan berlakunya UU HKPD pada tahun 2025. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa turunya tarif PKB di Sumatera Barat dari 1,65% menjadi 1,05% diproyeksikan akan menurunkan penerimaan PKB bagi pemerintah provinsi sebesar 9% dan berlakunya opsen PKB diproyeksikan dapat meningkatkan penerimaan PKB untuk kabupaten/kota sebesar 40%. Dengan berlakunya opsen PKB pada tahun 2025 terdapat 11 dari 19 wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang diproyeksikan mengalami peningkatan penerimaan yaitu Kota Padang, Bukittinggi, Solok, Payakumbuh, Kabupaten Agam, Limo Puluh Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Dharmasraya, dan Pasaman Barat dan Solok.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen PKB, Dana Bagi Hasil, HKPD, Sumatera Barat

Pembimbing Skripsi: Dr. Zulkifli N, SE. M.Si